

Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Tartila Seisha Syaputri¹, Periansya², Sri Hartaty³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, tartilaseishasyaputri01@gmail.com

²Politeknik Negeri Sriwijaya, periansya@polsri.ac.id

³Politeknik Negeri Sriwijaya, srihartaty@polsri.ac.id

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia merupakan fokus dari penelitian ini, yang bertujuan untuk mengukur dampak belanja daerah, tingkat ketergantungan, leverage, dan ukuran pemerintah daerah. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPK RI secara online untuk laporan keuangan setiap provinsi, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Dari tahun 2019 hingga 2023, para peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sample untuk mengumpulkan data dari 22 daerah yang berbeda di Indonesia. Kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi secara positif oleh ukuran pemerintah daerah, menurut data. Namun, ada dampak negatif yang cukup besar dari tingkat ketergantungan pada pemerintah daerah. Di sisi lain, kinerja keuangan pemerintah tidak terpengaruh oleh belanja daerah dan leverage. Hasil anggaran pemerintah provinsi di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh empat variabel yang saling terkait: belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, dan leverage.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, Leverage.

ABSTRACT

The financial "performance of provincial governments in Indonesia is the focus of this study, which aims to measure the impact of local expenditure, level of dependency, leverage, and size of local government. Using secondary data obtained from BPK RI online for each province's financial statements, this study utilizes a quantitative research methodology. From 2019 to 2023, the researchers in this study used a purposive sample technique to collect data from 22 different regions in Indonesia. Government financial performance is positively affected by the size of the local government, according to the data. However, there is a considerable negative impact of the level of dependency on local government. On the other hand, government financial performance is not affected by local expenditure and leverage. The budget outcomes of provincial governments in Indonesia are significantly affected by four interrelated variables: local expenditure, local government size, level of dependency, and leverage

Keywords : Government Financial Performance, Regional Expenditure, Size of Local Government, Degree of Dependency, Leverage..

A. PENDAHULUAN

Sejak 1 Januari 2001, perekonomian Indonesia telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri melalui pelaksanaan otonomi daerah. Secara spesifik, UU No. 1 Tahun 2002 menyatakan bahwa daerah otonom memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan keuangan daerah untuk kepentingan masyarakat. Sesuai dengan Permendagri No. 77 Tahun 2020, pengelolaan fiskal ini harus dilakukan secara sistematis, tertib, efisien, terbuka, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kinerja fiskal pemerintah daerah dan memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengalihkan otoritas

keuangan dari pemerintah federal, negara bagian dan kota bebas untuk mengelola anggaran mereka sendiri dengan lebih baik dan merespons kebutuhan spesifik di daerah mereka. Peraturan Pemerintah No. 12/2019 menyatakan bahwa untuk menilai pencapaian ini, kinerja keuangan di tingkat daerah merupakan metrik utama untuk melacak dan menilai keefektifan manajemen keuangan. Lebih lanjut, pencapaian pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan dampak dari pengelolaan keuangan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, keduanya diukur dengan kinerja keuangan pemerintah. (Insani et al., 2023).

Efisiensi dan alokasi sumber daya pemerintah dibantu oleh metrik kinerja sektor publik ini, yang juga mewujudkan akuntabilitas publik. Menerapkan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu cara untuk mengevaluasi seberapa baik pemerintah daerah menangani pengeluaran mereka. Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan adalah beberapa metrik keuangan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja fiskal pemerintah. (Halim, 2020).

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah mencapai pertumbuhan yang kompetitif dan berkelanjutan, dan rasio ini menunjukkan seberapa baik suatu daerah dapat mengelola keuangannya sendiri. Meskipun demikian, banyak daerah di Indonesia yang masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Tidak satu pun dari 34 provinsi yang dianggap Sangat Mandiri setelah meninjau laporan keuangan tahun 2019. Menurut BPK RI (2019), hanya sembilan provinsi yang telah mencapai kemandirian. Karena sebagian besar daerah telah gagal membangun sumber pendapatan mereka sendiri secara memadai, mereka bergantung pada pembayaran transfer dari pemerintah pusat.



Gambar Grafik Rasio Kemandirian Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber : BPK RI, (2025)

Berdasarkan gambar diatas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2019–2023, kinerja keuangan provinsi masih belum optimal, khususnya dalam hal pelaksanaan otonomi daerah. Difinubun & Gudono, (2021) menyatakan bahwa suatu daerah dikategorikan mandiri jika Pendapatan Asli Daerah

mampu membiayai minimal 25% dari total pengeluaran otonomi. Namun, banyak provinsi yang belum mencapai tingkat kemandirian tersebut, sehingga mencerminkan kinerja keuangan daerah yang belum stabil dan belum merata selama periode tersebut.

Belanja daerah merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui belanja daerah. Semakin besar anggaran, semakin baik layanan masyarakat.

Komponen kedua yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan fiskal adalah besarnya pemerintah daerah, yang diukur dengan total aset yang dimiliki. Pemerintah di tingkat negara bagian dan lokal dapat meningkatkan layanan publik dan meningkatkan laba dengan menentukan ukuran ideal mereka. Adi dan Tama (2018).

Setelah itu, pertimbangan lain untuk mencapai tujuan pembangunan dan memberikan layanan publik, sejauh mana suatu daerah bergantung pada pengelolaan dan distribusi dana publik menentukan tingkat ketergantungannya pada kinerja keuangan pemerintah. Terakhir, leverage merupakan pertimbangan penting karena mengacu pada pembiayaan aset daerah melalui utang, yang diperlukan karena daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan fiskalnya sendiri. Kinerja keuangan pemerintah daerah yang buruk tercermin dari tingginya leverage. (Salsabilla & Rahayu, 2021).

Beberapa penelitian terdahulu terkait kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang beragam. Kusumaningtyas (2023) menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah dan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan tingkat kemakmuran, ketergantungan fiskal, dan leverage justru berpengaruh negatif. Sedangkan penelitian Salsabilla & Rahayu, (2021) menunjukkan bahwa kekayaan daerah dan belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, namun leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sedangkan Sari & Halmawati (2023) menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Adanya temuan yang berbeda pada penelitian terdahulu menunjukkan adanya research gap yang menarik untuk diteliti kembali mengenai pengaruh Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, dan Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah untuk memperjelas penelitian terdahulu.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia, mengingat masih rendahnya tingkat kemandirian fiskal yang disebabkan oleh pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal. Temuan ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah. Kemudian berdasarkan fenomena yang telah diamati, banyak provinsi yang masih belum mandiri secara keuangan dan bergantung pada transfer dana pusat, meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mencari sumber pendapatan sendiri, namun potensi pendapatan yang terbatas sering kali membuat mereka bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dan penelitian ini memiliki kebaruan dalam menggunakan data terbaru dan relevan selama lima tahun terakhir (2019-2023) dalam menilai kinerja keuangan pemerintah. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pemerintah provinsi di Indonesia yang sebelumnya belum pernah diteliti secara mendalam oleh peneliti lain yang cenderung berfokus pada kabupaten/kota. Lebih



lanjut, penelitian ini menggabungkan empat variabel independen, yaitu belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, dan leverage yang belum pernah diteliti secara simultan, dengan pendekatan rasio kemandirian sebagai pengukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. KAJIAN TEORI

Teori Keagenan

Salah satu cara untuk melihat dinamika antara manajer dan karyawan di sebuah perusahaan adalah melalui lensa teori keagenan. Teori keagenan, seperti yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976), adalah kontrak antara prinsipal dan agen yang muncul dari adanya pemisahan tanggung jawab kepemilikan dan pengelolaan dalam suatu organisasi. Pemisahan ini diyakini dapat menimbulkan konflik keagenan. (Purba, 2023).

Kinerja Keuangan Pemerintah

Yang kami maksud dengan "kinerja keuangan pemerintah daerah" adalah seberapa baik kebijakan, peraturan, dan regulasi yang diberlakukan dalam periode anggaran tertentu menghasilkan hasil yang diinginkan dalam hal keuangan daerah, termasuk pendapatan dan pengeluaran daerah. Agar instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara terbuka dan jujur kepada masyarakat, kinerja keuangan daerah merupakan faktor penting dalam menilai manajemen dan kinerjanya. (Anynda & Hermanto, 2020).

Belanja Daerah

Belanja daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang mengurangi nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Mandat pemerintah, terutama untuk penyediaan layanan dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar, akan diutamakan dalam distribusi dana ini. (Sari & Halmawati, 2023).

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah ditentukan berdasarkan total aset yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Agar pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik sebaik mungkin, mereka membutuhkan aset yang memadai. Kualitas dan efektivitas administrasi pemerintah diyakini akan meningkat sebanding dengan jumlah aset yang dapat diakses. (Aulia, 2021).

Tingkat Ketergantungan

Ketergantungan suatu negara pada pemerintah federal dapat diukur dengan pendapatan transferanya. Pemerintah daerah mungkin akan merasa lebih sulit untuk menyesuaikan program guna memenuhi kebutuhan tertentu jika tingkat ketergantungannya tinggi. Selain itu, kinerja keuangan jangka panjang dan daya saing daerah dapat terpukul jika ada ketergantungan yang tidak sehat, yang dapat mengurangi motivasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (Astuti & Nugroho, 2022).

Leverage

Menurut Prayuda dan Arifin (2024), rasio utang yang tinggi terhadap pembiayaan aset mengindikasikan bahwa pemerintah tidak melakukan pekerjaan yang baik dalam mengelola keuangannya. Tingkat utang yang lebih tinggi

meningkatkan kemungkinan ketidakstabilan keuangan dan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap kekuatan luar.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat dipercaya dengan tujuan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah (Sugiyono 2023). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah provinsi di Indonesia periode 2019-2023, yang diperoleh dari situs web BPK RI (<http://www.bpk.go.id>).

Belanja di tingkat daerah (X1), ukuran pemerintah daerah (X2), tingkat ketergantungan (X3), dan leverage (X4) adalah empat variabel yang diteliti. Sebanyak 38 provinsi yang telah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerahnya dalam lima tahun terakhir menjadi populasi penelitian ini. Sebanyak 22 provinsi yang dipilih untuk penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria yang bertujuan untuk memilih provinsi yang sedang mengalami transisi, khususnya dari ketergantungan ke kemandirian.

Tabel Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Kinerja Keuangan (Y)	Kinerja Keuangan daerah diposisikan sebagai variabel terikat sebagai kemandirian daerah yang dinilai berdasarkan sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan tugasnya serta mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik dan sehat (Halim, 2020).	$R. \text{ Kemandirian} = \left(\frac{PAD}{\text{Transfer pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\% \right)$	Rasio
Belanja Daerah (X1)	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.	Belanja Daerah = Ln (Total Belanja)	Rasio
Ukuran Pemerintah Daerah (X2)	Ukuran Pemerintah Daerah menggambarkan besar kecilnya suatu daerah yang diukur melalui total aset yang dimiliki. Pemilihan total aset karena nilainya lebih stabil dibandingkan dengan jumlah pegawai maupun total produksi daerah.	Ukuran Daerah = Ln (Total Aset)	Rasio
Tingkat Ketergantungan (X3)	Tingkat ketergantungan diketahui dari banyaknya dana perimbangan yang di transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. (Aulia &	$= \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio



Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
	Rahmawaty, 2020) Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pusat.		
<i>Leverage</i> (X4)	<i>Leverage</i> menggambarkan besarnya penggunaan utang oleh pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan otonomi. Tingginya persentase leverage menunjukkan kondisi kinerja keuangan pemerintah daerah yang semakin menurun.	$= \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$	Rasio

Sumber : Data diolah dari berbagai referensi jurnal penelitian terdahulu, 2025

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari Belanja Daerah (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), Tingkat Ketergantungan (X3), *Leverage* (X4), dan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023 (Y).

Tabel Hasil Statistik Deskriptifs

	Y	X1	X2	X3	X4
Mean	3.943868	12.66174	13.01676	0.636855	0.062082
Median	3.997223	12.67000	13.03800	0.636000	0.047000
Maximum	4.912727	13.13800	13.55600	0.844000	0.301000
Minimum	2.561652	12.25600	12.36900	0.407000	0.003000
Std. Dev.	0.478662	0.220788	0.286189	0.103716	0.051572
Skewness	-0.265483	0.156918	-0.188640	-0.150092	1.608902
Kurtosis	2.800576	2.394732	2.749735	2.634240	6.637836
Jarque-Bera	1.474436	2.130526	0.939459	1.026166	108.1122
Probability	0.478443	0.344637	0.625171	0.598647	0.000000
Sum	433.8255	1392.791	1431.844	70.05400	6.829000
Sum Sq. Dev.	24.97379	5.313449	8.927566	1.172520	0.289908
Observations	110	110	110	110	110

Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12, 2025

Data observasi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tahun 2019-2023. Untuk setiap variabel, kami memiliki deskripsi statistik sebagai berikut: Terdapat standar deviasi sebesar 0.478662, minimum 2.561522, maksimum 4.912727, rata-rata 3.943868, dan variabel dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia (Y). Dengan standar deviasi sebesar 0,22 dan kisaran antara 12,25 hingga 13,13, Belanja Daerah (X1) memiliki rata-rata sebesar 12,66. Kisaran nilai untuk Ukuran Pemerintah Daerah (X2) adalah 12,36 hingga 13,55, dengan

13,01 sebagai rata-rata dan 0,28 sebagai standar deviasi. Terdapat standar deviasi sebesar 0,10, minimum 0,40, maksimum 0,84, rata-rata 0,63, dan derajat ketergantungan (X3) dengan nilai-nilai tersebut. Selanjutnya, kisaran nilai untuk Leverage (X4) adalah sebagai berikut: 0.003, 0.30, 0.06, dan 0.05 untuk nilai Std.Dev.

Uji Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model persamaan regresi data panel yang dibutuhkan, uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier akan digunakan untuk memilih model yang paling dapat diterima di antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Tabel Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.370495	(21,70)	0.0038
Cross-section Chi-square	51.567821	21	0.0002

Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12, 2025

Kami menerima H1 dan menolak H0 berdasarkan temuan uji Chow, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas F cross section adalah $0.0038 > 0.05$. Menentukan persamaan regresi paling baik dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM).

Tabel Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.110302	4	0.0386

Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12, 2025

H1 diterima dan H0 ditolak berdasarkan hasil uji Hausman, yang menunjukkan bahwa nilai probabilitas acak cross section adalah $0,0386 < 0,05$. Menentukan persamaan regresi paling baik dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM).

Karena kedua uji tersebut menghasilkan temuan probabilitas kurang dari 0,05, maka Fixed Effect Model (FEM) merupakan model yang lebih unggul dalam penelitian ini, dan uji Lagrange Multiplier (LM) tidak diperlukan. Berikut ini adalah hasil yang dihasilkan oleh Fixed Effect Model (FEM).

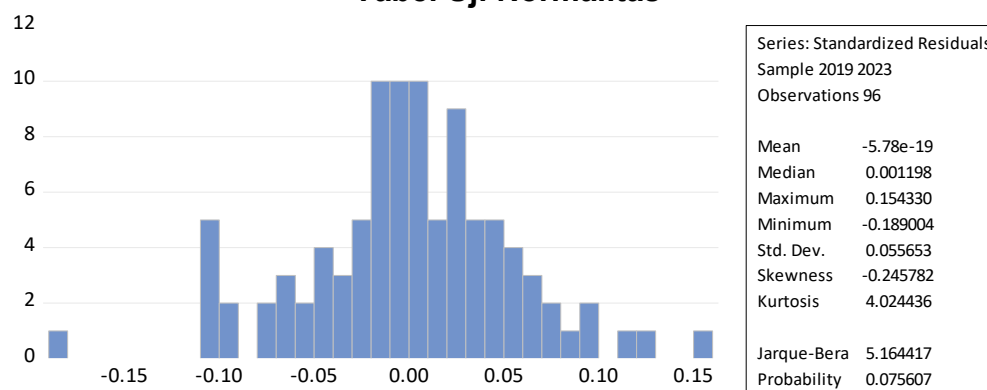
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.978348	4.264088	-0.229439	0.8192
X1	-0.039995	0.202984	-0.197034	0.8444
X2	0.603386	0.282972	2.132318	0.0365
X3	-3.825823	0.220783	-17.32846	0.0000
X4	0.399279	0.214806	1.858789	0.0673

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.055362	R-squared	0.983402
Mean dependent var	3.893319	Adjusted R-squared	0.977474
S.D. dependent var	0.431970	S.E. of regression	0.064833
Akaike info criterion	-2.408177	Sum squared resid	0.294236
Schwarz criterion	-1.713667	Log likelihood	141.5925
Hannan-Quinn criter.	-2.127445	F-statistic	165.8911
Durbin-Watson stat	2.001899	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12, 2025

Uji Asumsi Klasik

Tabel Uji Normalitas



Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12, 2025

Nilai probabilitas sebesar $0,075607 > 0,05$ diperoleh dari uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera (J-B). Oleh karena itu, data diasumsikan mengikuti distribusi normal.

Tabel Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000000	0.638342	-0.706420	-0.143539
X2	0.638342	1.000000	-0.411731	-0.010287
X3	-0.706420	-0.411731	1.000000	0.121094
X4	-0.143539	-0.010287	0.121094	1.000000

Belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, dan leverage merupakan variabel independen yang memiliki nilai korelasi di bawah 0,90, sesuai dengan hasil uji multikolinearitas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya masalah atau multikolinearitas di antara variabel-variabel independen dalam model regresi.

Tabel Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	0.160467	0.087791	1.827834	0.0718
X2	-0.111176	0.122386	-0.908405	0.3668
X3	-0.021262	0.095489	-0.222664	0.8244
X4	-0.054017	0.092904	-0.581426	0.5628
C	-0.525654	1.844228	-0.285027	0.7765

Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12, 2025

Kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas karena, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas, nilai probabilitas masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05.

Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = -0,978 - 0,039 X1 + 0,603 X2 - 3,825 X3 + 0,399 X4 + e$$

Berdasarkan data pada tabel tersebut, "Belanja Daerah (X1), Ukuran Pemerintah Daerah (X2), Tingkat Ketergantungan (X3) dan Leverage (X4) memiliki pengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah (Y)." Nilai koefisien regresi untuk variabel Belanja Daerah (β_1) sebesar -0,039995 bernilai negatif. Jadi, setiap penurunan X1 (Belanja Daerah), maka Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi akan naik. 2. Dengan nilai sebesar 0.603366, variabel Ukuran Pemerintah Daerah (β_2) memiliki koefisien regresi yang bernilai positif. Jadi, untuk setiap X2 (Ukuran Pemerintah Daerah) yang ditambahkan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi akan naik. Terdapat nilai negatif sebesar -3,825823 untuk koefisien regresi variabel Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah (β_3). Dengan demikian, ketika X3 (Tingkat Ketergantungan) mengalami penurunan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi akan mengalami kenaikan. Variabel Leverage (β_4) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,399279. Dengan demikian, ketika X4 (Leverage) mengalami kenaikan, maka Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi juga akan mengalami kenaikan.

Uji Hipotesis

Hasil uji Koefisien Determinasi (R2)

Root MSE	0.055362	R-squared	0.983402
Mean dependent var	3.893319	Adjusted R-squared	0.977474
S.D. dependent var	0.431970	S.E. of regression	0.064833
Akaike info criterion	-2.408177	Sum squared resid	0.294236
Schwarz criterion	-1.713667	Log likelihood	141.5925
Hannan-Quinn criter.	-2.127445	F-statistic	165.8911
Durbin-Watson stat	2.001899	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber: Data diolah dengan Eviews versi 12, 2025

Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, dan Leverage menjelaskan 97,7 persen dari varians Kinerja Keuangan Pemerintah



Provinsi di Indonesia, sesuai dengan nilai adjusted R^2 pada tabel sebesar 0,977. Variabel lain menyumbang 2,3 persen sisanya.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil uji F menunjukkan bahwa, dengan probabilitas $0,000 < 0,05$, nilai F-hitung sebesar 165,8911 melebihi nilai F-tabel sebesar 2,46. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak, yang mengindikasikan bahwa Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, dan Leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, keempat faktor tersebut harus dimaksimalkan.

Uji Parsial (Uji t)

Kami menemukan bahwa ukuran pemerintah daerah (X_2) dan tingkat ketergantungan (X_3) secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah, baik secara individu maupun secara kombinasi. Tingkat ketergantungan merupakan variabel independen yang memiliki dampak paling signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah, seperti yang ditunjukkan oleh nilai koefisien t-hitung yang besar.

PEMBAHASAN

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia tidak terdampak secara signifikan secara finansial oleh belanja daerah. Hal ini ditunjukkan melalui uji-t, yang merupakan uji parsial, di mana hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak. Meskipun belanja daerah memainkan peran penting dalam pelaksanaan APBD, namun hal ini belum mengarah pada kinerja keuangan yang lebih baik, terutama ketika belanja daerah tidak ditargetkan pada program-program yang memiliki pengaruh langsung atau disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Agar dana publik dapat berdampak pada kualitas pelayanan dan pembangunan daerah, reformasi administrasi anggaran dan pergeseran ke arah penganggaran strategis sangat diperlukan. Hanya dengan meningkatkan pengeluaran saja tidak akan berhasil.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Muhammad & Mangkuwinata, (2020), Nugroho & Prasetyo (2018), serta Suryaningsih & Sisdyani (2016), yang sama-sama menyimpulkan bahwa belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, karena alokasinya cenderung digunakan untuk belanja rutin atau administrasi. Pendapat Mahdiana & Amin (2020) menambahkan bahwa lemahnya akuntabilitas menyebabkan pengeluaran yang tidak optimal, sedangkan Anynda & Hermanto, (2020) menekankan bahwa efektivitas belanja tergantung pada alokasi yang tepat. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Sari & Halmawati, (2023), Salsabilla & Rahayu, (2021), dan Kusumaningtyas, (2023) yang menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah provinsi di Sumatera Selatan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran pemerintah daerah mereka, menurut penelitian ini. Temuan uji parsial (uji-t) menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H_a) diterima dan

hipotesis nol (H_0) ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal kinerja keuangan, pemerintah daerah yang lebih besar yang diukur dengan total aset memberikan hasil yang lebih baik. Pemerintah dapat menjalankan tugas operasionalnya, seperti penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur, secara lebih efisien dengan bantuan aset yang besar.

Hasil ini sejalan dengan temuan Aulia & Rahmawaty, (2020), Nursyam dkk. (2022), Kusumaningtyas, (2023), serta Alfi & Sari, (2023), yang menegaskan bahwa ukuran pemerintah daerah berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja keuangan. Pemerintah dengan aset besar dinilai memiliki kapasitas lebih tinggi dalam menyediakan layanan yang efektif dan akuntabel. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Julianti dkk, (2024) dan Kusuma & Handayani (2017) yang tidak menemukan pengaruh signifikan antara ukuran pemerintah dan kinerja keuangan.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan temuan uji parsial (t-test) dengan penolakan H_0 dan penerimaan H_a , penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan demikian, ketergantungan fiskal daerah meningkat sehubungan dengan jumlah dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah pusat, yang pada gilirannya berdampak pada penurunan kinerja keuangan. Rendahnya kemandirian fiskal dan tidak efektifnya pengelolaan pendapatan dan perencanaan program merupakan akar dari tingginya ketergantungan tersebut.

Hasil ini konsisten dengan temuan Suryaningsih & Sisdyani (2016), yang menyatakan bahwa ketergantungan fiskal yang tinggi dapat menyebabkan alokasi anggaran cenderung bersifat rutin dan tidak diiringi dengan peningkatan pendapatan daerah. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Aulia & Rahmawaty (2020) dan Nursyam dkk. (2022), yang menyimpulkan bahwa tingkat ketergantungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dengan menggunakan uji-t parsial sebagai bukti, temuan menunjukkan bahwa Leverage tidak berdampak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. Kami menerima (H_0) dan menolak (H_a) Hipotesis 4. Karena pemerintah provinsi tidak memperhitungkan tingkat utang ketika meningkatkan kinerja keuangan, perubahan leverage, baik meningkat atau menurun, tidak berdampak pada kinerja keuangan. Leverage yang lebih tinggi merupakan cerminan dari kinerja yang kurang baik karena merupakan hasil dari ketergantungan pada pinjaman dari sumber luar. Menurut teori keagenan, situasi ini muncul karena adanya ketidaksesuaian jumlah pengetahuan yang dimiliki oleh agen dan prinsipal, serta tidak adanya insentif untuk menggunakan dana secara optimal. Leverage memiliki pengaruh yang kecil terhadap rasio kemandirian keuangan karena pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pusat dan bukannya meningkatkan kemandirian pendapatan. Temuan ini berbeda dengan temuan Alfi & Sari (2023) dan Prayuda & Arifin (2024), tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Salsabila & Rahayu (2021), Kusumaningtyas (2023), dan Sedek & Kusumawati (2024).



Pengaruh Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil uji-F menunjukkan bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel, Oleh karena itu, H5 diakui sebagai hipotesis penelitian. Beberapa hipotesis dan penelitian sebelumnya mendukung penemuan ini. Sebagai ilustrasi, belanja daerah pada sektor produktif dapat meningkatkan efisiensi alokasi anggaran dan mendorong keberlanjutan keuangan jangka panjang (Permana & Sofyan, 2022). Dengan asumsi bahwa aset-aset tersebut merupakan potensi ekonomi dan modal yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka secara teoritis diasumsikan bahwa pemerintah daerah yang memiliki aset yang besar secara keseluruhan akan menunjukkan kinerja yang lebih baik. Kinerja yang lebih baik diperlukan untuk pemerintah daerah dengan ukuran aset yang besar, menurut Maiyora dkk. (2015). Selain itu, Sinaga dkk, (2022) menyoroti pentingnya dana transfer federal dalam meningkatkan kinerja fiskal pemerintah negara bagian dan daerah, yang pada gilirannya memfasilitasi pelaksanaan layanan dan infrastruktur publik yang penting. Dengan alokasi tujuan yang tepat dan pengelolaan yang bertanggung jawab, dana tersebut dapat meningkatkan kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membuat anggaran menjadi lebih efektif dan pelaporan keuangan daerah menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, menurut Intani & Waluyo (2018), belanja modal yang terkait dengan infrastruktur diperkirakan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah, yang pada gilirannya bermanfaat bagi pembangunan ekonomi daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, keempat faktor tersebut dapat berdampak positif atau negatif terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah provinsi di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Kusumaningtyas (2023) dan Salsabila & Rahayu (2021) yang juga menemukan bahwa belanja daerah, ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Belanja “Daerah tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.
2. Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia
3. Tingkat Ketergantungan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia
4. *Leverage* tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.
5. Secara simultan, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan, dan *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah provinsi di Indonesia.”

Saran

1. Peningkatan pengelolaan Belanja Daerah penting untuk mengoptimalkan belanja daerah agar efektif menunjang pembangunan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran demi capaian kinerja keuangan yang nyata
2. Peningkatan optimalisasi aset daerah penting untuk mengelola dan memanfaatkan aset daerah secara optimal dengan menjaga transparansi dan akuntabilitas untuk mencapai kinerja keuangan yang baik

3. Peningkatan pengeurangan ketergantungan dengan mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat dengan menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi kemandirian daerah berkelanjutan.
4. Daerah harus berhati-hati dalam menggunakan utang (*leverage*), membatasi penggunaannya hanya untuk belanja produktif yang memberikan nilai tambah pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, agar tidak membebani di masa depan.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel bebas dan memperluas rentang tahun penelitian untuk hasil yang lebih komprehensif, serta menggabungkan data primer dan sekunder demi akurasi penelitian yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, M. R., & Sari, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Jumlah Penduduk dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(3), 1098–1114. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.750>
- Amin Insani, Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Astuti, F., & Nugroho, A. (2022). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Ketergantungan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 14(1), 40–52.
- Aulia, R. E. (2021). Pengaruh Ukuran Daerah, Tingkat Ketergantungan Dengan Pusat, Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Aulia, R., & Rahmawaty. (2020). Pengaruh Kemakmuran Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Dan Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 5(4), 584–598. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v5i4.16826>
- Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62–91. <https://doi.org/10.36232/jurnalfairakuntansiunimuda.v1i1.1404>
- Halim. (2020). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Selemba Empat.
- Intani, R., & Waluyo, I. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 6(4).



- Julianti Hilan, Agustina Fitri, K. Y. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2.373>
- Kusumaningtyas, L. (2023). *Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Ketergantungan, Tingkat Kemakmuran, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021*.
- Maiyora, G., Yusraini, P., & Natariasari, R. (2015). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera). In *Jom FEKON* (Vol. 2, Issue 2).
- Muhammad, S., & Mangkuwinata, I. (2020). Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen Sonny Muhammad Ikhsan Mangkuwinata | Pengaruh Belanja Daerah Terhadap *Jurnal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen- Aceh*, XIII(1), 12–17.
- Nur Shafira Anynda, S. B. H. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Ganec Swara*, 18(1), 41. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.732>
- Prayuda, Y. W., & Arifin, J. (2024). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance (NCAF)*, 6, 77–87.
- Purba, R. (2023). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).
- Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). *Pengaruh Wealth , Leverage Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2019) The Effect Of Wealth , Leverage And Regional Expenditure On Regional Financial Performance (Case St.* 8(6), 8479–8487.
- Sinaga, F.C., Tumija, & Azhari, L. (2022). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 12(3), 47–50.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryaningsih, N. M., & Sisdyani, E. A. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1453-1481